

## **BAB IV**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Selanjutnya secara rinci identifikasi isu-isu strategis menurut fungsi dan urusan pemerintahan daerah sebagai perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

#### **4.1. PELAYANAN UMUM**

##### **4.1.1. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Sleman saat ini dilakukan dengan diawali dari musyawarah pembangunan desa, musrenbang Kecamatan, musrenbang Kabupaten dan Provinsi. Dengan dilakukannya proses tersebut diharapkan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Sleman dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara optimal.

- a. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada urusan perencanaan pembangunan antara lain:
  - 1) Perhatian SKPD terhadap pentingnya dokumen perencanaan masih kurang;
  - 2) Kemampuan SKPD dalam mengartikulasikan kebutuhan masyarakat masih kurang;

- 3) Kemampuan keuangan daerah dalam pembiayaan program pembangunan masih terbatas;
  - 4) Data pendukung perencanaan pembangunan kurang akurat;
  - 5) Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan masih kurang;
  - 6) Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan masih rendah;
  - 7) Belum sinerginya proses perencanaan pembangunan nasional dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik;
  - 8) Dokumen perencanaan yang disusun belum menekankan pada perencanaan yang terfokus dan langsung dapat dilaksanakan, cenderung masih berupa wishing list, serta program dan kegiatan yang direncanakan masih belum disusun berdasarkan pada ketersediaan anggaran;
  - 9) Adanya ego atau kepentingan antarsektor yang seringkali dinyatakan sebagai kesulitan untuk melakukan koordinasi, sehingga persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga cenderung tidak menyentuh atau menyelesaikan persoalan yang sebenarnya;
  - 10) Adanya anggapan atau asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar wilayah;
  - 11) Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah;
  - 12) Masih terdapat kesulitan untuk memastikan adanya konsistensi antara perencanaan (program/kegiatan) pembangunan dan alokasi penganggarnya;
  - 13) Belum optimalnya sistem pengendalian dan evaluasinya pembangunan.
- b. Isu strategis pada urusan perencanaan pembangunan adalah belum efektifnya perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) yang disebabkan oleh kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan,

kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

#### **4.1.2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian**

Pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 belum seperti yang diharapkan. Otonomi Daerah mengandung makna mengatur segala sesuatunya secara mandiri, baik pengelolaan pemerintahan maupun pembiayaannya. Namun pada kenyataannya Pemerintah Kabupaten masih tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengaturan sumberdaya aparatur.

##### **a. Permasalahan**

- 1) Potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal;
- 2) Pengadaan pegawai belum sesuai antara formasi riil dengan formasi pegawai yang ditetapkan Pemerintah;
- 3) Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil;
- 4) Penegakan hukum belum efektif;
- 5) Produk hukum daerah masih banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
- 6) SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Standar Operasional;
- 7) Pelayanan perijinan belum optimal;
- 8) Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal;
- 9) Hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan.

- b. Isu strategis pada urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian adalah belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil dan produk hukum daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan.

#### **4.1.3. Statistik**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai. Kewenangan daerah dalam urusan statistik meliputi pengumpulan dan pemanfaatan data dan statistik daerah.

a. Permasalahan

- 1) Penetapan data tunggal belum disepakati;
- 2) Data sektoral dari SKPD kurang konsisten;
- 3) Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih rendah;
- 4) Kualitas SDM di bidang kestatistikan belum memadai;
- 5) Sarana dan prasarana pengelolaan data dan statistik belum memadai.

b. Isu strategis pada urusan statistik adalah belum optimalnya kualitas SDM dan komitmen dalam pengelolaan data dan statistik.

#### **4.1.4. Kearsipan**

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip aktif, arsip inaktif, dan dokumentasi daerah.

a. Permasalahan:

- 1) Sarana dan prasarana kearsipan belum memadai;
- 2) Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai;
- 3) Manajemen arsip belum dilaksanakan secara menyeluruh;
- 4) Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip belum optimal.

b. Isu-isu strategis pada urusan kearsipan adalah belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana kearsipan.

#### **4.1.5. Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sarana strategis peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pelaksanaan urusan perpustakaan mengacu pada Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang antara lain mengatur kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan perpustakaan.

a. Permasalahan

- 1) Sarana dan prasarana pengelolaan perpustakaan belum memadai;
- 2) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia belum memadai;

- 3) Minat baca masyarakat masih rendah.
- b. Isu Strategis pada urusan perpustakaan adalah belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana dan prasarana perpustakaan.

#### **4.1.6. Komunikasi dan Informatika**

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- a. Permasalahan:
  - 1) Sarana dan prasarana teknologi informasi belum memadai;
  - 2) Sistem informasi manajemen yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal;
  - 3) e-government belum diimplementasikan secara optimal;
  - 4) Kualitas sumberdaya manusia belum memadai ;
  - 5) Adanya ketentuan pada tahun 2011 semua software harus berlisensi harus diantisipasi untuk penggunaan open source.
- b. Isu strategis pada urusan komunikasi dan informatika adalah belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan perijinan telekomunikasi.

#### **4.2. KETERTIBAN DAN KEAMANAN**

##### **4.2.1. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**

Kondisi daerah yang aman dan kondusif menjadi prasyarat utama pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu penciptaan kondisi daerah yang aman, tertib, dan tenteram menjadi isu utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

- a. Permasalahan:
  - 1) Gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat;
  - 2) Penegakan Perda belum optimal;
  - 3) Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi peraturan masih belum optimal;
  - 4) Sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban belum memadai;

- 5) Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi masih kurang;
  - 6) Jiwa nasionalisme dan patriotisme cenderung menurun;
  - 7) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia masih kurang.
- b. Isu strategis pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan.

#### **4.2.2. Penanggulangan Bencana**

Penanganan bencana alam yang dilaksanakan umumnya hanya sampai pada tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi. Kegiatan mitigasi bencana yang bertujuan untuk mengurangi resiko bencana belum banyak dilakukan. Paradigma harus dirubah dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan bencana.

Perubahan menuju paradigma pengelolaan bencana tersebut setidaknya mencakup tiga aspek berikut ini; 1) penanganan bencana tidak lagi difokuskan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi lebih pada keseluruhan manajemen resiko; 2) perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata kewajiban pemerintah; 3) penanganan bencana bukan lagi menjadi semata-mata tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama (antara pemerintah dengan masyarakat).

##### **a. Permasalahan**

- 1) Kegiatan penanggulangan bencana masih pada tahapan tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi sehingga belum menjadikan kegiatan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas;
- 2) Kelembagaan penanggulangan bencana masih melekat di SKPD Kesbanglinmas sehingga untuk kegiatan yang dilakukan hanya sebatas pada mitigasi non fisik, sedangkan kegiatan mitigasi fisik dilakukan oleh SKPD yang lain, hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian sarana yang seharusnya dibutuhkan;
- 3) Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih kurang;
- 4) Proses identifikasi, kajian dan pemantauan resiko bencana serta menetapkan sistem peringatan dini masih kurang;

- 5) Pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana belum dimanfaatkan.
- b. Isu strategis pada urusan penanggulangan bencana adalah perlunya integrasi kegiatan mulai dari pra bencana, saat terjadi bencana, dan paska bencana secara seimbang dan sinergis.

#### **4.3. EKONOMI**

##### **4.3.1. Perhubungan**

Sistem dan manajemen transportasi yang baik merupakan faktor pendukung utama untuk mengembangkan kegiatan ekonomi, sosial budaya, politik, keamanan dan ketertiban serta sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu memelihara dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi agar tetap dalam kondisi mantap serta mengembangkan sarana transportasi perdesaan dan perkotaan secara terpadu menjadi penting.

##### **a. Permasalahan**

- 1) Sarana dan prasarana terminal belum memenuhi syarat;
  - 2) Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas masih terbatas;
  - 3) Banyak simpang jalan yang belum memenuhi syarat;
  - 4) Pelayanan angkutan umum belum memadai;
  - 5) Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal;
  - 6) Pemasangan LPJU belum merata pada ruas jalan yang padat lalu lintas, masih banyak yang belum dilengkapi KWH meter, dan masih banyak LPJU tanpa ijin/illegal;
  - 7) Ruas jalan di Kabupaten Sleman belum diklasifikasikan berdasar kelas jalan;
  - 8) Terminal angkutan barang dan rest area kendaraan barang belum tersedia;
  - 9) Pemilik kendaraan wajib uji belum semua melakukan pengujian kendaraannya secara berkala.
- b. Isu strategis pada urusan perhubungan adalah kurangnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

#### **4.3.2. Ketenagakerjaan**

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Urusan ketenagakerjaan berkaitan dengan kondisi penduduk usia kerja, angkatan kerja, dan ketersediaan lapangan kerja.

##### **a. Permasalahan**

- 1) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- 2) Kualitas dan daya saing calon tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar;
- 3) Sarana prasarana penyelenggaraan pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja;
- 4) Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai;

##### **b. Isu Strategis pada urusan ketenagakerjaan adalah terbatasnya lapangan kerja dan kualitas calon tenaga kerja tidak sesuai kebutuhan pasar.**

#### **4.3.3. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**

Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi.

##### **a. Permasalahan**

- 1) Kualitas SDM pengelola koperasi/UMKM masih rendah;
- 2) Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah;
- 3) Jaringan pasar industri kecil dan kemitraan dalam usaha pemasaran masih terbatas;
- 4) Akses modal bagi UMKM masih terbatas.

##### **b. Isu strategis pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah terbatasnya akses modal, pasar dan adopsi teknologi.**

#### **4.3.4. Penanaman Modal**



Keberhasilan investasi/penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari besarnya konsumsi dalam negeri atau regional bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor.

a. Permasalahan

- 1) Pengelolaan promosi investasi belum optimal;
- 2) Iklim investasi belum kondusif khususnya dalam hal pelayanan perizinan;
- 3) Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar terbatas.

b. Isu strategis pada urusan penanaman modal adalah belum optimalnya pengelolaan investasi.

#### **4.3.5. Ketahanan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya ketahanan pangan serta mampu mengatasi kendala dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem pangan yang terdiri atas tiga sub sistem yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di tingkat rumah tangga, distribusi pangan yang lancar dan konsumsi pangan yang bermutu dan aman untuk meningkatkan kualitas SDM.

a. Permasalahan

- 1) Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal;
- 2) Penggunaan bahan kimia berbahaya untuk bahan tambahan pangan masih banyak;
- 3) Penegakan hukum distribusi pangan masih belum optimal;
- 4) Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun;
- 5) Peranan penyuluh pertanian dalam mendampingi petani belum optimal;
- 6) Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal.

b. Isu Strategis pada urusan ketahanan pangan adalah belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal, masih banyaknya penggunaan bahan aditif yang berpengaruh pada keamanan pangan, dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.

#### **4.3.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Pemberdayaan Masyarakat dimaksudkan guna dapat mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

##### **a. Permasalahan**

- 1) Teknologi Tepat Guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal;
- 2) Peran dan fungsi kelembagaan masyarakat belum optimal;
- 3) Peran serta masyarakat dalam pembangunan di kawasan perkotaan cenderung menurun;
- 4) Pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal;
- 5) Peran perempuan dalam pembangunan belum optimal;
- 6) Kemampuan keuangan desa dalam pembangunan masih terbatas;
- 7) Pengelolaan administrasi pemerintahan desa kurang tertib.

b. Isu strategis pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan desa.

#### **4.3.7. Pertanian**

Penduduk Kabupaten Sleman mayoritas masih tinggal di perdesaan dengan mata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian dalam menyumbang PDRB di Kabupaten Sleman mengalami penurunan, tetapi dalam penyerapan tenaga kerja masih cukup tinggi. Pengembangan urusan pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan dan perkebunan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka memberdayakan potensi sumberdaya yang dimiliki.

##### **a. Permasalahan**

- 1) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian masih cukup tinggi;
- 2) Sarana dan prasarana produksi pertanian sering tidak terjangkau oleh petani;
- 3) Serangan hama dan penyakit pertanian masih cukup tinggi;
- 4) Harga hasil produksi pertanian tidak stabil;

- 5) Pengelolaan lahan tegalan belum optimal;
  - 6) Kemampuan dalam pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil produk pertanian masih rendah;
  - 7) Pengelolaan manajemen agribisnis belum optimal;
  - 8) Jaringan informasi pasar produk pertanian belum optimal;
  - 9) Kapasitas kelembagaan pertanian belum optimal;
  - 10) Tata guna dan tata kelola air belum optimal;
  - 11) Akses permodalan bagi petani belum merata.
- b. Isu Strategis pada urusan pertanian adalah masih cukup tingginya alih fungsi lahan, biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual, belum optimalnya manajemen agribisnis, dan akses permodalan yang belum merata.

#### **4.3.8. Kehutanan**

Pembangunan urusan kehutanan di Kabupaten Sleman sesuai dengan potensinya lebih diarahkan untuk konservasi, bukan produksi. Pada lereng Gunung Merapi bagian selatan, terdapat kawasan hutan lindung yang pengelolaannya dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Disamping kawasan hutan lindung, sebagian masyarakat di kabupaten Sleman juga membudidayakan beberapa jenis tanaman kayu sebagai kawasan konservasi dan hutan tanaman industri yang banyak terdapat di Prambanan, Cangkringan, Pakem, dan Gamping bagian selatan.

- a. Permasalahan
- 1) Ancaman kerusakan hutan oleh bencana letusan gunung merapi;
  - 2) Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal;
  - 3) Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang;
  - 4) Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat dari kegiatan penambangan;
  - 5) Luas lahan kritis masih cukup banyak.
- b. Isu strategis pada urusan kehutanan adalah semakin berkurangnya luas hutan rakyat dan masih cukup luasnya lahan kritis.

#### **4.3.9. Perikanan**

Secara Geografis Sleman tidak mempunyai wilayah perairan laut, tetapi Perkembangan komoditas perikanan budidaya produksinya meningkat. Hal ini tidak terlepas dari melimpahnya potensi air yang berasal dari sumber mata air lereng Gunung Merapi maupun Selokan Mataram.

Dibandingkan dengan komoditas pertanian tanaman pangan khususnya komoditas padi, pelaku usaha di bidang perikanan lebih menarik. Pasar komoditas perikanan khususnya ikan konsumsi untuk wilayah dalam dan luar propinsi DIY masih terbuka lebar.

a. Permasalahan

- 1) Tata guna dan tata kelola air belum optimal;
- 2) Fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan belum optimal;
- 3) Produksi ikan konsumsi belum mampu mencukupi kebutuhan konsumen;
- 4) Akses permodalan petani perikanan masih kurang;
- 5) Kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan umum masih kurang.

b. Isu strategis pada urusan perikanan adalah belum optimalnya tataguna dan tata kelola air serta fungsi kelembagaan petani pembudidaya perikanan, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan ekosistem perairan.

#### **4.3.10. Perdagangan**

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas.

a. Permasalahan

- 1) Daya saing produk Sleman di pasar nasional maupun global masih rendah;
- 2) Kelancaran distribusi bahan pokok / barang strategis belum optimal;
- 3) Pelaku usaha dalam membaca peluang pasar kurang optimal;
- 4) Perlindungan konsumen belum optimal;

- 5) Kondisi sarana prasarana pasar tradisional kurang memadai.
- b. Isu strategis pada urusan perdagangan adalah masih rendahnya daya saing produk Sleman di pasar nasional maupun global, belum lancarnya distribusi bahan pokok/barang strategis, dan kurang memadainya kondisi sarana prasarana pasar tradisional.

#### **4.3.11. Industri**

Sebagai daerah penyangga bagi daerah lain yang secara geografis berada di bawahnya, Sleman tidak mungkin mempunyai kawasan industri besar yang sebenarnya secara ekonomis mampu meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu industri di Sleman diutamakan bagi industri yang ramah lingkungan dan padat karya.

- a. Permasalahan
  - 1) Penguasaan dan penerapan teknologi bagi UMKM masih kurang;
  - 2) Kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM masih rendah;
  - 3) Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar;
  - 4) Akses permodalan bagi UMKM masih rendah;
  - 5) Ketersediaan bahan baku industri masih terbatas;
  - 6) Kemitraan antar pelaku usaha belum optimal.
- b. Isu Strategis pada urusan industri adalah masih kurangnya kualitas manajemen pengelolaan usaha bagi UMKM, inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar, dan belum optimalnya kemitraan antar pelaku usaha.

#### **4.3.12. Energi dan Sumberdaya Mineral**

Semua padukuhan di Kabupaten Sleman sudah terdapat jaringan listrik dari PLN, tetapi masih terdapat beberapa kelompok rumah yang belum terjangkau. Kelompok rumah yang belum terjangkau aliran listrik terutama pada daerah terpencil dan permukiman baru.

Sumberdaya mineral yang terdapat di Kabupaten Sleman semua masuk kategori bahan galian golongan C (BGGC). Potensi yang paling besar adalah pasir dan batu terutama yang berasal dari gunung merapi.

- a. Permasalahan:

- 1) Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN;
  - 2) Potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan mikrohidro belum dimanfaatkan secara optimal;
  - 3) Perubahan pola penggunaan energi fosil dan kayu bakar ke gas LPG belum semua dilakukan oleh masyarakat;
  - 4) Kelangkaan gas LPG kadang masih terjadi;
  - 5) Kegiatan penambangan rakyat tidak berijin masih cukup banyak;
  - 6) Kegiatan penambangan rakyat pada lahan produktif masih cukup banyak;
  - 7) Kegiatan penambangan banyak tidak menggunakan kaidah teknis yang benar;
  - 8) Kerusakan lahan akibat penambangan yang tidak diikuti dengan reklamasi masih cukup banyak.
- b. Isu strategis pada urusan energi dan sumberdaya mineral adalah masih terdapatnya rumah tangga yang belum teraliri listrik, masih banyak penambangan yang tidak ramah lingkungan.

#### **4.3.13. Ketransmigrasian**

Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Sleman selama ini mendasarkan pada kerjasama antara pemerintah daerah (baik pengirim maupun penerima) dan pemerintah pusat sebagai fasilitatornya sedangkan pola transmigrasi yang dilaksanakan adalah melalui Transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarya Mandiri (TSM).

##### **a. Permasalahan**

- 1) Program transmigrasi masih sepenuhnya tergantung dari kebijakan pemerintah pusat;
  - 2) Relatif tingginya animo masyarakat untuk bertransmigrasi yang tidak sebanding dengan jumlah kuota dari pemerintah pusat;
  - 3) Lokasi tujuan transmigrasi seringkali belum siap, baik sarana dan prasarana dan administrasi pertanahan.
- b. Isu strategis pada urusan transmigrasi adalah animo masyarakat untuk bertransmigrasi relative tinggi tidak sebanding dengan kuota pemerintah pusat dan ketidaksiapan lokasi transmigrasi.

## **4.4. LINGKUNGAN HIDUP**

### **4.4.1. Penataan Ruang**

UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diarahkan untuk mewujudkan visi penataan ruang: yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, nyaman untuk menjalankan aktivitas dalam suasana yang tenang dan damai, produktif sehingga proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, dan berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas lingkungan fisik untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

#### **a. Permasalahan**

- 1) Rencana rinci tata ruang belum mencakup seluruh Kabupaten Sleman;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dan Rencana Rinci Tata Ruang yang telah disusun sampai saat ini ada yang belum ditetapkan menjadi produk hukum;
- 3) Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
- 4) Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;
- 5) Pembangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan masih banyak;
- 6) Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan sebelum melakukan kegiatan masih kurang.

b. Isu Strategis pada urusan penataan ruang adalah belum semua wilayah di Kabupaten Sleman mempunyai RDTR, produk tata ruang yang telah disusun belum mempunyai kekuatan hukum, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang.

### **4.4.2. Lingkungan Hidup**

Kondisi lingkungan di Kabupaten Sleman secara umum masih cukup baik. Ini terbukti dari hasil pengujian kualitas air dan kualitas udara yang dilakukan oleh KPDL hampir semua parameter masih dibawah baku mutu, walaupun ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun.

#### **a. Permasalahan:**

- 1) Sarana prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan semakin terbatas;
  - 2) Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah belum mencukupi;
  - 3) Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi;
  - 4) Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin berkurang;
  - 5) Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan;
  - 6) Penanganan air limbah rumah tangga /domestik belum dilakukan secara terpadu;
  - 7) Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
  - 8) Dampak pemanasan global semakin meningkat.
- b. Isu strategis pada urusan lingkungan hidup adalah terjadinya degradasi lingkungan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak pemanasan global.

#### **4.4.3. Pertanahan**

Penatagunaan tanah meliputi pengaturan penggunaan tanah, pemanfaatan tanah, dan penguasaan tanah. Kebijakan pemanfaatan tanah di Kabupaten Sleman dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui proses perizinan peruntukan penggunaan tanah, sedangkan pengadministrasian penggunaan tanah dilakukan oleh Kantor Pertanahan.

Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pensertifikatan tanah pada masyarakat, telah dilaksanakan program LARASITA (Pelayanan Rakyat untuk Pensertifikatan Tanah). Yaitu pelayanan pensertifikatan tanah dengan menggunakan mobil keliling ke wilayah-wilayah yang jauh dari kantor pertanahan untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat.

##### **a. Permasalahan**

- 1) Sertifikasi tanah kas desa, tanah pemda maupun tanah hak milik masih rendah;
- 2) Pengelolaan tanah pemerintah (Negara, Pemkab, Kas Desa) belum baik;
- 3) Pengelolaan sistem informasi pertanahan belum optimal;
- 4) Pelayanan perijinan dan sertifikasi pertanahan belum optimal;



- b. Isu Strategis pada urusan pertanahan adalah belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah.

#### **4.5. PERUMAHAN**

##### **4.5.1. Pekerjaan Umum**

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum meliputi pengelolaan jalan, jembatan, dan irigasi. Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan terus diupayakan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan perkembangan perekonomian daerah. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi terus diupayakan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. Sebagai daerah penyangga air bagi daerah di bawahnya Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk menjadikan wilayahnya menjadi daerah konservasi dengan memperbanyak tampungan air melalui pembangunan embung.

##### **a. Permasalahan**

- 1) Tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan;
  - 2) Kelebihan tonase angkutan barang mempercepat kerusakan jalan dan jembatan;
  - 3) Pelanggaran pemanfaatan ruang milik jalan masih banyak terjadi;
  - 4) Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi;
  - 5) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;
  - 6) Peralatan penunjang pelaksanaan urusan pekerjaan umum masih kurang;
  - 7) Konflik kepentingan pemanfaatan air irigasi masih sering terjadi;
- b. Isu strategis pada urusan pekerjaan umum adalah tingkat kerusakan jalan, jembatan, dan irigasi tidak sebanding dengan pembangunannya serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana.

##### **4.5.2. Perumahan**

Permukiman akan terus tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pelaksanaan urusan perumahan meliputi penataan perumahan dan prasarana dan sarana lingkungan perumahan seperti air bersih, drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, permakaman.

a. Permasalahan

- 1) Fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan masih banyak yang belum diserahkan pada Pemerintah Daerah;
  - 2) Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana permukiman masih kurang;
  - 3) Pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sleman;
  - 4) Pelayanan sanitasi belum menjangkau seluruh masyarakat;
  - 5) Rumah tidak layak huni masih cukup banyak;
  - 6) Penyediaan tempat pemakaman umum bagi perumahan masih kurang;
  - 7) Pengelolaan sistem drainase belum memadai;
  - 8) Rumah yang belum ber IMB masih cukup banyak.
- b. Isu Strategis pada urusan perumahan adalah belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.

#### **4.6. KESEHATAN**

##### **4.6.1. Kesehatan**

Dalam rangka memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan telah dicapai kemajuan penting berupa peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai beberapa indikator yaitu meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir, menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu dan berkurangnya persentase balita dengan gizi buruk.

a. Permasalahan

- 1) Ketersediaan sumberdaya kesehatan yang belum memadai;
- 2) Pelayanan kesehatan belum optimal;
- 3) Kasus balita gizi buruk masih ada;
- 4) Ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular masih terjadi;
- 5) Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang;

- 6) Fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai;
  - 7) Penduduk miskin belum seluruhnya mendapat jaminan kesehatan.
- b. Isu Strategis pada urusan kesehatan adalah terbatasnya sumberdaya kesehatan, belum optimal pelayanan kesehatan, masih adanya ancaman penyakit menular maupun penyakit yang tidak menular, dan masih banyaknya penduduk yang belum menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan.

#### **4.6.2. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Perkembangan program keluarga berencana di Kabupaten Sleman cukup baik. Salah satu keberhasilan program KB ditandai dengan meningkatnya prevalensi peserta KB (peserta aktif/pasangan usia subur). Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas penduduk.

##### **a. Permasalahan**

- 1) Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata;
  - 2) Tingkat partisipasi KB pria masih rendah;
  - 3) Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang;
  - 4) Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) belum optimal;
  - 5) Kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB cukup tinggi;
  - 6) Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal;
  - 7) Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga (BKB, BKL, BKR dan PKLK) belum optimal.
- b. Isu Strategis pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi, belum optimalnya pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), cukup tingginya kepesertaan pasangan usia subur tidak ber KB.

#### **4.7. PARIWISATA DAN BUDAYA**

#### **4.7.1. Kebudayaan**

Dalam rangka mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur yang mengandung nilai-nilai universal, diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral yang mendukung pembangunan daerah.

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sleman bertujuan untuk mengembangkan penanganan kawasan cagar budaya dan desa budaya, meningkatkan kualitas karya seni, meningkatkan kesadaran budaya dan sejarah bangsa, melestarikan warisan budaya daerah/nasional, inovasi dan kreativitas dalam mengelola museum, serta penempatan bahasa dan sastra jawa sebagai asset daerah yang bernilai tinggi.

a. Permasalahan:

- 1) Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah;
- 2) Pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal;
- 3) Partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya masih kurang;
- 4) Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak;
- 5) Kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya masih terbatas;
- 6) Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial.

b. Isu strategis pada urusan kebudayaan adalah masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari, belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya, dan masih terbatasnya kualitas sumberdaya manusia pelaku budaya.

#### **4.7.2. Pariwisata**

Pariwisata merupakan bagian dari gaya hidup memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kunjungan wisatawan. Data statistik angka kunjungan wisatawan ke obyek-obyek wisata di Sleman menunjukkan peningkatan. Dengan segala potensi yang ada, baik potensi alam, budaya, maupun potensi pendidikan tinggi yang menjadi obyek dan daya tarik wisata (ODTW), sehingga berpengaruh pada angka kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

a. Permasalahan

- 1) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang;

- 2) Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang;
  - 3) Kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal;
  - 4) Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal;
  - 5) Keterpaduan dan sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.
- b. Isu Strategis pada urusan pariwisata adalah masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW, dan belum optimalnya kualitas SDM petugas dan pelaku usaha pariwisata.

## **4.8. PENDIDIKAN**

### **4.8.1. Pendidikan**

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan berada pada pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, merata dan relevan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diperlukan berbagai program yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

#### **a. Permasalahan**

- 1) Warga masyarakat yang buta huruf masih sebanyak 7,01%;
- 2) Anak usia 3-6 tahun yang belum terlayani lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak sebanyak 33,60%;
- 3) Anak putus sekolah SD/MI sebesar 0,04%, SMP/MTs sebesar 0,12% dan SMA/SMK/MA sebesar 0,19%;
- 4) Pendidik yang baru memenuhi standar kualifikasi DIV/S1 jenjang TK 14%, SD 20%, SMP 66%, SMA/SMK 88%;
- 5) Sarana prasarana minimal pada jenjang TK dan SD terutama perpustakaan dan laboratorium serta mebelair masih kurang;

- 6) Etika dan penguasaan bahasa Jawa di lingkungan peserta didik masih rendah;
  - 7) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang;
  - 8) Kompetensi lulusan siswa SMA belum sesuai dengan pasar kerja.
- b. Isu Strategis pada urusan pendidikan adalah belum optimalnya aksesibilitas, sarana dan prasarana dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### **4.8.2. Kepemudaan dan Olah Raga**

Potensi, peran pemuda serta prestasi olahraga yang telah dicapai dalam pembangunan sumberdaya manusia selama ini sangatlah besar bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Sleman.

- a. Permasalahan:
- 1) Akses dan kesempatan bagi pemuda yang tergolong tidak mampu untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan masih rendah;
  - 2) Masalah sosial di kalangan pemuda seperti kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA) dan HIV masih cukup tinggi;
  - 3) Sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga belum mencukupi;
  - 4) Jiwa kewirausahaan di kalangan pemuda masih rendah;
  - 5) Pemuda belum sebagai "*agent of change*";
  - 6) Pembinaan olah raga belum optimal;
  - 7) Pembentukan karakter kepribadian pemuda belum optimal.
- b. Isu Strategis pada urusan kepemudaan dan olah raga adalah banyaknya masalah sosial di kalangan pemuda, terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan pemuda dan olah raga, dan kurangnya pembinaan pemuda dan olah raga.

### **4.9. PERLINDUNGAN SOSIAL**

#### **4.9.1. Kependudukan dan Catatan Sipil**

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sleman lebih dipengaruhi oleh migrasi dari pada kelahiran/kematian. Hal ini mengakibatkan pengelolaan administrasi kependudukan menjadi lebih rumit.

a. Permasalahan

- 1) Validitas data penduduk masih rendah;
- 2) Migrasi penduduk antar wilayah cukup tinggi;
- 3) Sistem administrasi kependudukan sering mengalami perubahan;
- 4) Sarana dan prasarana pendukung sistem informasi administrasi kependudukan masih sangat terbatas;
- 5) Petugas khusus yang menangani administrasi kependudukan di tingkat desa belum tersedia;
- 6) Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang;

b. Isu Strategis pada urusan kependudukan dan catatan sipil adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat dalam tertib administrasi kependudukan.

#### **4.9.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan). Sebagai sumberdaya insani, sebenarnya potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki seimbang. Namun demikian masih terdapat kesenjangan gender meskipun gap nya tidak terlalu besar. Perlindungan anak ditujukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas.

a. Permasalahan

- 1) Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang;
- 2) Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi;
- 3) Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah;
- 4) Anak jalanan, anak korban narkoba, anak terlantar dan anak putus sekolah masih ada;
- 5) Perlindungan anak terhadap pengaruh negatif media masih kurang.

- b. Isu Strategis pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah kurangnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, terdapatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, tingginya pengaruh negatif media terhadap pembentukan kepribadian anak, dan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak.

#### **4.9.3. Sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan/ keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung.

##### **a. Permasalahan**

- 1) Prosentase KK miskin masih cukup tinggi;
  - 2) Gelandangan, pengemis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi masih ada;
  - 3) Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah;
  - 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel belum memadai;
  - 5) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
  - 6) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal;
  - 7) Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas.
- b. Isu Strategis pada urusan sosial adalah masih cukup tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).



